



Akuntabilitas Keuangan UMKM: Bagaimana Perspektif dari Sebuah UMKM Bidang Perdagangan?

Arif Widyatama dan Maria Yanida

STIE Panca Bhakti Palu, STIE YBPK Palangka Raya

arifu_tama@yahoo.com

doi:10.18382/jraam.v1i3.47

Informasi Artikel

Tanggal masuk	27-12-2015
Tanggal revisi	26-03-2016
Tanggal diterima	26-03-2016

Keywords:

*Financial Accountability,
Perspective,
SMEs*

Abstract

This study aims to determine the depth of SME's understanding towards accountability that embodied in the financial statements. This is important since the financial statements must be reported as part of accountability to external parties. This research was conducted based on qualitative method and phenomenological approach. The site of this research is an SME engaged in a fish trade. The results show that the SME has not realised the meaning and importance of accountability. This is due to simple bookkeeping and financial reporting done by this SME, which is not in accordance with the applicable standard (SAK ETAP).

Kata kunci:

Akuntabilitas Keuangan,
Perspektif,
UMKM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntabilitas yang diwujudkan dalam laporan keuangan. Pemahaman ini penting, mengingat laporan keuangan yang dihasilkan, harus dipertanggungjawabkan kepada pihak eksternal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. UMKM yang menjadi situs penelitian adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang perdagangan ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum memahami makna dan merasa pentingnya akuntabilitas. Hal ini disebabkan karena selama ini mereka hanya melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan yang sederhana dan belum sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK ETAP.

1. Pendahuluan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh semua entitas termasuk pedagang-pedagang kecil sebagai suatu entitas bisnis. Bila laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas sudah mencerminkan keadaan sebenarnya, maka laporan keuangan tersebut andal dan dapat dijadikan acuan bagi pihak yang berkepentingan, yaitu investor, pemerintah, karyawan bahkan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki be-

ragam skala perusahaan, mulai dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sampai dengan perusahaan multinasional. Agar laporan keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dipertanggungjawabkan maka perlu adanya sebuah aturan atau standar yang mengatur laporan keuangan UMKM agar dapat secara umum digunakan oleh semua pihak.

Penggunaan standar akuntansi seharusnya dapat diterapkan ke masing-masing institusi atau entitas, termasuk UMKM. Namun hal tersebut tidak mudah, sebagaimana dinyatakan oleh Cieslewicz (2014) bah-

wa perubahan standar akuntansi bukan hal yang dapat langsung diterapkan ke masing-masing institusi, namun negara perlu memerhatikan hal-hal yang tidak dapat terlihat dan hal tersebut menjadi hambatan dalam penerapan standar akuntansi yang baru.

Oleh sebab itu, di Indonesia memberlakukan sebuah standar bagi UMKM agar ketika menyusun laporan keuangan, dapat mempertanggungjawabkan secara akuntabel. SAK ETAP merupakan standar yang digunakan untuk UMKM untuk membuat laporan keuangan. SAK ETAP ini disusun oleh Dewan Standar dengan menyesuaikan pada konteks lingkungan (Dambrin et al., 2007; Ezzamel et al., 2007; Lukka, 2007; Nor-Aziah dan Scapens, 2007; Arnaboldi dan Azzone, 2010; Pipana dan Czarniawska, 2010).

Namun, penerapan Standar Akuntansi kepada UMKM bukanlah hal yang mudah. UMKM selaku pelaku bisnis membutuhkan waktu dan sumberdaya dalam mengimplementasikan standar tersebut. Padahal kemampuan pelaku UMKM dalam membuat pembukuan sangatlah rendah, sehingga bila standar ini wajib diterapkan, maka harus melalui proses adaptasi.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa terdapat banyak UMKM di Kabupaten Sigi yang tidak mampu membuat sebuah pembukuan sederhana untuk memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi. Siregar (2015) menyatakan bahwa sebagian besar UMKM masih belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam membuat pembukuan. Padahal, pembukuan yang dilakukan oleh pelaku UMKM sangat penting selain agar bisa mengetahui tingkat kekayaan perusahaan, tingkat kegiatan operasionalnya. Pembukuan ini juga penting sebagai dasar dalam kegiatan peminjaman dana ke Bank guna pengembangan kegiatan bisnisnya. Oleh sebab itu, perlu adanya pembukuan yang akuntabel agar tingkat akuntabilitas dan transparansi UMKM, khususnya di Kabupaten Sigi menjadi meningkat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM memaknai proses akuntabilitas keuangan dengan menggunakan SAK ETAP. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya UMKM yang belum memahami mengenai SAK ETAP, dan bahkan cenderung acuh terhadap akuntabilitas usaha yang digeluti.

2. Kajian Teori

2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tanggung jawab bagi pihak yang mempercayakan tanggung ja-

wab. Pembahasan tentang akuntabilitas mengarah pada upaya-upaya penggalan skema internal organisasi yang bersandar pada aspek profesionalisme di satu sisi dan relasi eksternal yang mengarah pada pertanggung jawaban sosial dan politik di sisi lain. Upaya untuk membedakan kedua hal tersebut telah dilakukan oleh Bovens (2010) dengan membedakan akuntabilitas sebagai kebajikan (*as a virtue*) dan akuntabilitas sebagai suatu hubungan sosial (*as a social relation*).

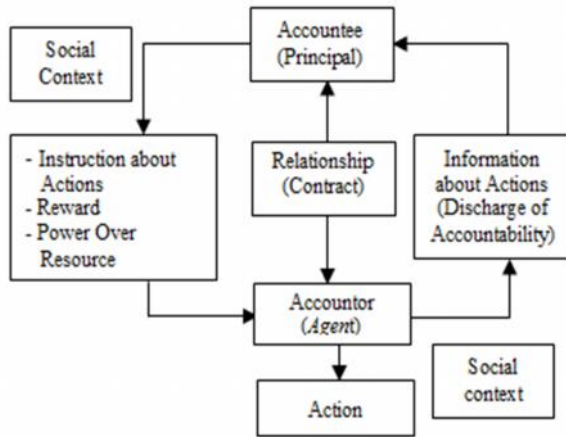
However, there is a pattern to the expansion. Particularly, but not exclusively, in American academic and political discourse, accountability is used mainly as a normative concept, as a set of standards for the evaluation of the behaviour of public actors... The focus of accountability studies is not whether the agents have acted in an accountable way, but whether they are or can be held accountable ex post facto by accountability forums.

Pada tataran praktik, penerapan mekanisme akuntabilitas kepada siapa suatu pertanggungjawaban diberikan (*principle-agent relationship*) telah melahirkan berbagai zona akuntabilitas. Mekanisme pertanggungjawaban juga sering dinyatakan sebagai hubungan antara forum dan aktor. Fokus bukan pada apakah aktor tersebut telah melakukan prosedur secara akuntabel, tapi apakah mereka dinilai akuntabel oleh forum. Ketika mekanisme akuntabilitas memasuki wilayah parlemen, dikenal istilah akuntabilitas politik. Untuk wilayah peradilan dikenal istilah akuntabilitas legal. Pada saat mekanisme memasuki wilayah-wilayah administratif dikenal istilah akuntabilitas administratif. Sebagai contoh, akuntabilitas administratif dapat ditemukan ketika lembaga publik harus mempertanggungjawabkan konsistensi mereka atas prosedur administratif pelayanan di hadapan Ombudsman, atau terkait pengelolaan keuangan di hadapan auditor. Pada saat memasuki mekanisme yang mengarah kepada relasi antara lembaga publik terhadap warga negara atau masyarakat sipil, dikenal istilah akuntabilitas sosial (Bovens, 2010).

Pada setiap sistem akuntabilitas, ada hubungan moral, dimana individu atau kelompok kecil menggunakan dominasi terhadap lainnya untuk memastikan bahwa sesuatu telah dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang. Hubungan akuntabilitas menunjukkan hubungan duaarah antara dua pihak yang disebut *principal* dan *agent*.

Gray et al. (1996) menggambarkan hubungan

akuntabilitas ke dalam sebuah model yang disebut *a generalised accountability model*. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan situasi yang paling kompleks dalam suatu hubungan akuntabilitas. Gambar tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar1A Generalised Accountability Model

Sumber: Gray *et al.* (1996)

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan SAK ETAP

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah industri yang memiliki kontribusi bagi masyarakat. Adanya UMKM ini harusnya bisa memberikan pendapatan bagi daerah. Karena pentingnya kontribusi UMKM bagi daerah, maka diperlukan akuntabilitas bagi UMKM tersebut. Saat ini, akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) semakin dirasakan kebutuhannya, bahkan bagi setiap unit dalam masyarakat. Individu harus mempertanggungjawabkan penghasilan yaitu dengan membayar pajak, demikian juga perusahaan (mikro, kecil, menengah maupun besar) juga harus mempertanggungjawabkan usahanya kepada masyarakat, manajemen, pemilik modal maupun badan-badan pemerintah tentang cara mengelola dan hasil yang dicapai. Sehingga pihak yang menerima pertanggungjawaban akan dapat menggunakan informasi tersebut (laporan keuangan) dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pentingnya proses pembuatan laporan keuangan perlu dilakukan oleh UMKM, guna bentuk pertanggungjawaban bagi pihak eksternal.

Namun agar proses pembuatan laporan keuangan UMKM dapat diterima dan diterima bagi pihak eksternal maka perlu adanya standar yang mengatur. UMKM harus mengacu pada SAK ETAP yang penerapannya memberikan kinerja positif bagi UMKM. SAK ETAP diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan

Menengah (UMK), Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). ETAP adalah Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. ETAP diterbitkan tahun 2009, berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. Diterapkan secara retrospektif, jika tidak praktis diperkenankan prospektif. Prospektif berarti:

1. Mengakui semua aset dan kewajiban sesuai SAK ETAP;
2. Tidak mengakui aset dan kewajiban jika tidak diijinkan oleh SAK ETAP;
3. Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK ETAP; dan
4. Menerapkan pengukuran aset dan kewajiban yang diakui sesuai SAK ETAP.

Informasi keuangan yang akurat dan relevan, akan membantu suatu entitas lebih mandiri dalam aktivitas usahanya. Seperti yang dikemukakan oleh Megginson *et al* (2000), bahwa informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang handal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha kecil dan keditur (Bank).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai bagaimana individu dari setiap UMKM memahami dari implementasi standar akuntansi yang dibebankan. Informasi digali dengan mendalam dan menggunakan wawancara terhadap pemilik UMKM tersebut serta orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan. Penyebabnya tidak lain disebabkan informasi yang diperoleh dari pemilik UMKM tersebut kurang relevan sehingga ada kemungkinan saat penelitian, peneliti mewawancarai selain informan yang berasal dari pemilik usaha.

Metode kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena metode ini lebih digunakan untuk memahami realitas sosial sebagai realitas subjektif, memberikan tekanan terbuka tentang kehi-

dupan sosial, khususnya tentang perilaku UMKM-UMKM setelah adanya implementasi standar akuntansi. Apakah pemahaman dari UMKM tersebut akan berubah mengenai praktik akuntansi jika suatu standar akuntansi berubah? Ataukah UMKM-UMKM tersebut malah tidak memahami praktik akuntansi yang mereka buat? Atau mungkin tidak memahami apa yang sebenarnya yang mereka buat selama ini?

Peneliti mempertimbangkan kajian psikologi sebagai bidang kajian yang menyangkut dimensi kemanusiaan yang dimana dimensi ini adalah dimensi subjektif maka paradigma yang tepat adalah paradigma interpretif. Menurut Ludigdo(2005), paradigma interpretif, yang dalam banyak hal juga disebut sebagai paradigma konstruktif menekankan bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memahami realitas dunia apa adanya. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka peneliti memilih fenomenologi sebagai metode pemahaman akan realitas dengan dimensi subjektif dalam penelitian ini. Harapan peneliti, dengan fenomenologi peneliti dapat memahami bagaimana makna dan simbol dari satu pemahaman para pelaku realitas dan bagaimana mereka mengimplementasikan suatu praktik akuntansi yang apabila suatu standar di dunia ini berubah.

Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah UMKM yang berada di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Pertimbangan peneliti mengambil UMKM yang berada di Kota Palu disebabkan peneliti melihat UMKM yang berada di Kabupaten Sigi lambat laun semakin menurun perkembangannya. Tidak adanya perkembangan yang signifikan menjadi dasar pertimbangan pelaku UMKM Kabupaten Sigi dijadikan sebagai situs penelitian. Sehingga peneliti mencoba menggali apakah hal tersebut disebabkan karena standar akuntansi, serta bertujuan melihat bagaimana interpretasi terhadap standar akuntansi tersebut. Pertimbangan lain yakni peneliti sudah lama tinggal di daerah tersebut sehingga hal tersebut lebih memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pelaku UMKM sebagai informan kunci dalam mengeksplorasi mengenai pemaknaan dari kegiatan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Personil UMKM yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 2 orang. Berbeda dengan penelitian kuantitatif/verifikatif, pada penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif informan dalam mengungkap pemaknaan mengenai akuntabilitas yang dipahami oleh pelaku UMKM tidak memiliki batasan dalam hal jumlah. Sepanjang data yang

diperoleh telah mencukupi dalam mengungkap permasalahan serta dapat memahami informasi yang telah diungkapkan oleh informan maka dianggap informan tersebut sudah cukup untuk memberikan data yang peneliti maksud.

Untuk mendapatkan sampel yang diharapkan maka peneliti mencari informan yang juga merupakan pelaku UMKM di bidang perdagangan. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah informan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dalam hal ini menjual ikan di Kabupaten Sigi. Pengambilan informan ini bukanlah tanpa alasan. Terdapat pertimbangan-pertimbangan yang peneliti pikirkan sebelum mengambil informan ini. Pertimbangan yang paling penting adalah bahwa informan yang dipilih merupakan informan yang sudah lama bergerak dalam kegiatan UMKM sehingga diharapkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan pemaknaan akuntabilitas dalam perubahan standar akuntansi yang terjadi di Indonesia.

Penelitian dilakukan pada sebuah UMKM yang bergerak di bidang perdagangan ikan. UMKM bidang ini dijadikan target penelitian dikarenakan ikan merupakan salah sumber daya yang melimpah di daerah Sigi. Penelitian ini menggunakan unit organisasi UMKM yang berada di Kabupaten Sigi sebagai objek penelitian. Pemilihan objek ini karena Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami pemekaran. Sehingga hal ini mengindikasikan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah masih belum 'terkontaminasi' dengan pemahaman unit-unit UMKM di Kabupaten Sigi. Selain itu, pemilihan objek ini dikarenakan masyarakat di Kabupaten Sigi masih hampir didominasi oleh masyarakat suku asli. Hal ini menjadi menarik, karena hasil penelitian ini nantinya bisa digunakan dalam pengambilan kebijakan terkait pemahaman masyarakat asli tentang akuntabilitas UMKM.

Informan dalam penelitian ini merupakan informan yang adalah penjual ikan namun hanya sebatas pada karyawan yang diberikan gaji setiap bulan oleh pemilik usaha. Peneliti memilih informan ini dengan pertimbangan karena informan ini sudah terlibat langsung dengan kegiatan usaha, sehingga pemahaman yang dimiliki terhadap pemaknaan akuntabilitas dianggap dapat lebih mendalam. Informan kedua merupakan informan yang bertindak sebagai pemilik usaha.

Alasan pemilihan informan ini dikarenakan peneliti menganggap pemilik UMKM ini memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan UMKM dan memiliki peran sebagai pemilik usaha. Sehingga diha-

rapkan informan ini memiliki pandangan yang berbeda dengan karyawan tersebut. Pandangan yang peneliti maksudkan adalah cara pandang dalam memahami akuntabilitas dari sudut pandang lain yaitu sebagai pemilik usaha. Karyawan merupakan salah satu informan yang dipilih oleh peneliti dikarenakan pada hal ini terdapat pemisahan pencatatan yang dilakukan oleh karyawan dan pemilik usaha. Karyawan melakukan pencatatan atas penjualan maupun pembelian yang dilakukan selama hari itu, sehingga berdasarkan alasan ini maka karyawan tersebut dianggap representatif untuk dijadikan informan.

Informan selanjutnya adalah pemilik UMKM. Karena, pemilik merupakan orang yang dinilai tahu mengenai segala apa yang berkaitan dengan usahanya yang dalam hal ini adalah mengenai pajak. UMKM yang menjadi objek atau informan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di kota Palu. Selain pemilik UMKM, informan kedua juga ikut menjalankan kegiatan operasional di UMKM tersebut. Informan kedua merupakan pemilik usaha. Pemilik usaha menjadi target peneliti karena pernah menempuh pendidikan akuntansi sewaktu SMA namun dalam menjalankan usahanya tidak membuat pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Peneliti menginginkan adanya tanggapan, pandangan, reaksi, dan interpretasi atas SAK ETAP dari UMKM yang berbeda latar belakang guna mempertajam data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan ucapan yang selanjutnya dianalisa untuk dijadikan bukti-bukti guna mendukung kebenaran dalam pengungkapan suatu pandangan mengenai alasan interpretasi objek terhadap fenomena.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, pertama melakukan survei pendahuluan yaitu dengan menggali informasi *up-to date* baik melalui artikel, internet, media cetak, dan lainnya untuk memperoleh gambaran tentang UMKM dan memahami permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Tahap kedua adalah dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data jadi yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal maupun aturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan teori-teori yang mendukung. Langkah terakhir adalah dengan melakukan proses pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan observasi, wawancara, rekaman, dan dokumentasi.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi. Dalam observasi tersebut peneliti melakukan wawancara secara mendalam guna

memperoleh informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Pada proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam untuk mempermudah proses pengumpulan data. Dokumentasi juga digunakan untuk menambah informasi yang mendukung penelitian.

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan pendekatan fenomenologi (Creswell, 1998:54-55), yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan;
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting;
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan dengan melakukan *horizontalizing*, yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya pernyataan yang tidak relevan dengan topik pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif dihilangkan sehingga yang tersisa hanya yang *horizons* (arti tekstural dan unsur pembentuk atau pembentuk dari *phenomenon* yang tidak mengalami penyimpangan);
4. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi;
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada informan) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi); dan
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan mengenai fenomena tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelusuran yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum memahami masalah laporan keuangan yang harus dibuat atas usaha yang digeluti. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa pedagang ikan belum menyadari bahwa laporan keuangan perlu dibuat. Sistem pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak pedagang ikan adalah sangat konvensional. Bentuknya hanya berupa pencatatan sederhana untuk mengetahui keuntungan perhari, namun tidak memerhatikan bahwa pencatatan tersebut harus terekapitulasi selama sa-

tu periode (satu tahun) guna bahan evaluasi kinerja perusahaan.

Tidak adanya laporan keuangan yang andal menyulitkan pihak eksternal untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha UKMM. Sehingga pihak eksternal akan sulit untuk menganalisis kinerja dari UMKM tersebut. Pada akhirnya keputusan yang diambil terhadap kinerja UMKM tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini mencoba untuk menguak mengenai hal-hal yang menyebabkan proses akuntabilitas di UMKM sangat rendah, serta ingin memahami secara lebih mendalam mengenai berjalannya proses tersebut.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara mendalam dan berusaha lebih memahami mengenai 'perasaan' mereka dalam memahami tentang akuntabilitas. Wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM yang berprofesi sebagai pedagang ikan di jalan-jalan Kabupaten Sigi. Informan menyampaikan:

" ... waduh Pak, kami sebagai pengusaha ikan tidak tau menau tentang akuntabilitas yang bapak maksud seperti apa, tapi kalo kayak penjelasan bapak sebelumnya kami membuat sebuah pencatatan tapi tidak seperti yang seharusnya. Kami kebanyakan cuma tamatan SD Pak, jadi kalau mau ditanya mengenai konsep akuntabilitas masih sangat jauh. Yang penting kami bisa jualan dan makan itu sudah cukup pak"

Berdasarkan hasil informasi tersebut diperoleh sebuah kesimpulan yang cukup menarik untuk dimaknai, yaitu mengenai konsep akuntabilitas yang merupakan tujuan akhir dari penerapan SAK ETAP bagi UMKM. Pemahaman UMKM terkait dengan akuntabilitas tidak seperti yang diharapkan bagi pembuat standar. Bagi pelaku UMKM pemaknaan akuntabilitas tidak seperti halnya memahami bahwa akuntabilitas merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada pihak eksternal. Bagi pelaku UMKM akuntabilitas adalah tentang mengenai tentang cara mereka bisa menghidupi keluarga mereka dengan hasil yang diperoleh dari usaha yang mereka geluti. Bukan seperti definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli dimana akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak eksternal.

Selain itu, pemaknaan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa pelaku UMKM belum mengetahui tentang esensi dari sebuah transparansi dan akuntabilitas. Fenomena tersebut menjadi

sebuah jawaban tersendiri bagi penelitian ini terkait mengenai definisi akuntabilitas yang merupakan tujuan akhir dari pembukuan sederhana. Akibat kurang mengetahui secara jelas konsep transparansi dan akuntabilitas. Pencatatan yang dilakukan tidak seperti di SAK ETAP yang telah diharuskan oleh pembuat standar. Lanjutan wawancara berikut merupakan sebuah jawaban dari pembukuan sederhana yang dilakukan oleh pelaku UMKM.

" ... Pak kita ini te tau caranya ba buat itu laporan keuangan SAK ETAP yang bapak bilang tadi, pencatatan yang torang lakukan ini masih sederhana sekali. Sedangkan SAK ETAP yang bapak bilang baru kita dengar leh. Torang cuma catat berapa modal yang diambil paginya, nanti dihitung berapa yang laku nanti malamnya dihitung berapa sisa ikan yang tersisa sama berapa uang yang kita dapat. Kita catat juga bukan di buku pak, tapi cuma di gulungan rokok saja nanti kalau sudah selesai itu gulungannya kita buang saja"

Ada suatu landasan berpikir yang menarik, dan bisa dimaknai dengan mendalam. SAK ETAP yang seharusnya digunakan oleh UMKM guna bentuk pertanggungjawaban masih belum digunakan dan diimplementasikan dengan baik oleh pelaku UMKM. Pelaku UMKM menganggap bahwa SAK ETAP belum terlalu penting untuk diimplementasikan. Banyak pelaku UMKM belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya pencatatan. Hal tersebut dapat dijadikan sebuah tolok ukur bahwa masyarakat yang merupakan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya belum mementingkan informasi yang tersurat dalam laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas sangat penting untuk membentuk peningkatan kredibilitas perusahaan dalam melakukan peminjaman dana guna peningkatan usahanya.

Hasil penelitian ini juga memberikan sebuah kontribusi kepada teori institusional yang merupakan landasan berpikir penelitian ini. Terdapat suatu makna yang sebenarnya tersirat dari hasil penelitian ini terkait permasalahan pemahaman implementasi SAK ETAP yaitu perilaku pelaku UMKM dalam memahami sebuah realita lebih dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar. Sehingga ketika memahami sebuah realitas seperti halnya proses pembukuan hanya didasarkan norma atau sebuah 'aturan' yang tercipta sendiri dalam sebuah organisasi di sekitar. Hal ini menjadi suatu

permasalahan yang cukup urgensi dalam penerapan implementasi SAK ETAP yang notabene merupakan standar yang harus diimplementasi dalam proses pembukuan sederhana. Ketaatan dari pelaku UMKM dalam sebuah norma pembukuan yang tercipta secara tersendiri dalam proses pembukuan dapat menyebabkan mereka gagal dalam peningkatan kredibilitas menurut versi “standar”. Hal ini dikarenakan dalam proses ekspansi perusahaan harus menggunakan dana, serta dana yang dibutuhkan untuk proses ekspansi harus meminjam dana dari bank selaku pihak ketiga.

Esensi dari akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tanggung jawab bagi pihak yang mempercayakan tanggungjawab. Dalam perkembangan, pembahasan tentang akuntabilitas mengarah pada upaya-upaya penggalan skema internal organisasi yang bersandar pada aspek profesionalisme di satu sisi dan relasi eksternal yang mengarah pada pertanggungjawaban sosial dan politik di sisi lain. Upaya untuk membedakan kedua hal tersebut telah pula dilakukan oleh Boven (2008) dengan membedakan akuntabilitas sebagai kebajikan (*as a virtue*) dan akuntabilitas sebagai suatu hubungan sosial (*as a social relation*).

“However, there is a pattern to the expansion. Particularly, but not exclusively, in American academic and political discourse, accountability is used mainly as a normative concept, as a set of standards for the evaluation of the behaviour of public actors... [t]he focus of accountability studies is not whether the agents have acted in an accountable way, but whether they are or can be held accountable ex post facto by accountability forums.”

Padatataran praktik, penerapan mekanisme akuntabilitas kepada siapa suatu pertanggungjawaban diberikan (*principle-agent relationship*) telah melahirkan berbagai zona akuntabilitas. Dalam beberapa pembahasan, sering juga dinyatakan sebagai hubungan antara forum dan aktor. Fokus bukan pada apakah aktor tersebut telah melakukan prosedur secara akuntabel, tapi apakah mereka dinilai akuntabel oleh forum. Ketika mekanisme akuntabilitas memasuki wilayah parlemen, dikenal istilah *akuntabilitas politik*. Untuk wilayah peradilan dikenal istilah akuntabilitas legal. Pada saat mekanisme memasuki wilayah-wilayah administratif dikenal istilah akuntabilitas administratif. Sebagai contoh, *akuntabilitas administratif* dapat ditemukan ketika lembaga publik harus mempertanggung-

jawabkan konsistensi mereka atas prosedur administratif pelayanan di hadapan Ombudsman, atau terkait pengelolaan keuangan di hadapan auditor. Pada saat memasuki mekanisme yang mengarah kepada relasi antara lembaga publik terhadap warga negara atau masyarakat sipil, dikenal istilah *akuntabilitas sosial* (Bovens, 2010).

Bila pernyataan ini disangkutpautkan dengan hasil eksplorasi maka diperoleh hasil bahwa bahwa pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Sigi masih belum akuntabel. Hal itu terlihat dari berbagai hasil wawancara yang menyimpulkan bahwa masih belum adanya pemahaman yang memadai terkait dengan pelaporan laporan keuangan dengan mengacu pada SAK ETAP. SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Prinsip-prinsip SAK penting diperhatikan pihak UKM agar pengelolaan bisnis lebih efektif, efisien, dan akurat, sehingga UKM dapat mengelola usahanya secara profesional dan berkembang lebih besar lagi. Apabila SAK ETAP diterapkan oleh UKM, pihak perbankan tentu akan merespon dengan positif, karena akan memudahkan perbankan dalam menilai kelayakan bisnis UKM untuk memperoleh bantuan kredit pengembangan usaha. Disamping itu, UKM tentu akan memiliki data (keuangan) akurat yang berguna bagi pelaku UKM dalam upaya lebih meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi usaha.

Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai sarana terjalinnnya proses komunikasi informasi antara data keuangan dan aktivitas perusahaan. Laporan keuangan merupakan bahan pertimbangan atau mata rantai dalam proses pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis UKM tersebut, sekaligus bisa berfungsi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dari manajemen dalam menjalankan usahanya secara profesional.

Pola pengelolaan keuangan yang diterapkan pada usaha kecil dapat berpedoman kepada pola umum yang telah dikenal dan digunakan oleh berbagai perusahaan besar, namun jika kurang sesuai dapat dimodifikasi sesuai dengan keperluan dengan tetap memperhatikan fungsi perencanaan dan pengawasannya. Administrasi pembukuan usaha kecil memerlukan minimal 3 jenis buku catatan, yaitu: (1) Buku Harian, (2) Buku Jurnal, (3) Buku Besar (Subanar, 2011:69). Laporan keuangan yang memadai akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan usaha (internal) maupun pihak luar (eksternal). Kegunaan tersebut berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan

pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Dalam era pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang merupakan titik perhatian dalam masyarakat, kegunaan akuntansi akan semakin dirasakan. Fungsi akuntansi menjadi semakin penting bagi setiap unit dalam masyarakat, individu harus mempertanggungjawabkan penghasilan yaitu dengan membayar pajak, demikian juga perusahaan (mikro, kecil, menengah maupun besar) juga harus mempertanggungjawabkan usahanya kepada masyarakat, manajemen, pemilik modal maupun badan-badan pemerintah tentang cara mengelola dan hasil yang dicapai, dan pada gilirannya pihak yang menerima pertanggungjawaban akan dapat menggunakan informasi tersebut (laporan keuangan) dalam proses pengambilan keputusan yang harus mereka buat.

Selain dampak langsung dari SAK ETAP yang penerapannya memberikan kinerja positif bagi UKM, informasi keuangan yang akurat dan relevan akan membantu suatu entitas lebih mandiri dalam aktivitas usahanya. Seperti yang dikemukakan oleh Megginson *et al* (2000), bahwa:

“Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang handal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil, antara akses tambahan modal bagi usaha kecil dan kreditur (Bank)”

UKM perlu menggunakan SAK ETAP pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK Umum, karena dalam SAK ETAP masih banyak yang berprinsipkan *historical cost* dibandingkan SAK umum yang menggunakan *fair value*.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas perlu dihadirkan dalam diri pelaku UMKM. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan SAK ETAP bagi UMKM. Penerapan SAK ETAP sebagai wujud dari akuntabilitas merupakan jelajah eksplorasi dari perjalanan akuntansi khususnya untuk UMKM. Sehingga jika SAK ETAP ini diterapkan dengan baik maka UMKM khususnya pedagang ikan yang menjadi subjek penelitian ini, mampu mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu periode. Selain, sebagai bahan evaluasi kinerja adanya

laporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP merupakan alat untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga maupun sebagai alat meningkatkan citra perusahaan agar para pemodal yakin bahwa usahanya berjalan dengan baik. Sehingga, pada akhirnya dapat menarik pemodal untuk menanamkan modalnya pada usaha tersebut.

Namun, realita yang diperoleh dilapangan berbanding terbalik. Pemahaman dasar UMKM tidak seperti yang diharapkan para pembuat standar. UMKM masih belum sadar bahwa untuk membuat sebuah laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP merupakan hal yang penting, mengingat kontribusi yang dihasilkan dari adanya laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP menjadi penting. Bagi UMKM esensi laporan keuangan dengan SAK ETAP akan melahirkan akuntabilitas dan transparansi bagi kepentingan UMKM. Pemaknaan yang diperoleh bahwa pihak UMKM masih memiliki orientasi jangka pendek, dengan hanya memerhatikan pencatatan dalam bentuk harian bahkan cenderung tidak melakukan rekapan selama setahun. Pencatatan dilakukan hanya untuk mengetahui jumlah modal yang dikeluarkan serta keuntungan yang diperoleh.

Oleh sebab itu, hal ini dapat menjadi perhatian bagi pembuat standar untuk lebih memerhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kapabilitas dari pelaku UMKM untuk melaporkan laporan keuangan. Hal ini penting mengingat laporan keuangan merupakan sebuah hal yang wajib dimiliki oleh UMKM dalam perluasan usaha. Adanya laporan keuangan dapat menjadi sebuah landasan bagi UMKM untuk meminjam dana kepada pihak ketiga untuk perluasan usaha. Ketika didasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan ke pelaku UMKM hal tersebut menunjukkan bahwa saat UMKM ingin memperluas usahanya, maka UMKM tersebut masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan menggadaikan sertifikat kekayaan pribadi seperti tanah, emas dan kekayaan lainnya.

Daftar Rujukan

- Arnaboldi, M. and Azzone G. (2010). Constructing Performance Measurement in the Public Sector. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(4), 266-282.
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism, *West European Politics*, 33(5), 946-967.
- Cieslewicz, J. K. (2014). Relationships Between National Economic Culture, Institutions, and

- Accounting: Implications for IFRS. *Critical Perspectives on Accounting*. 25(6), 511-528.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry: Choosing among Five Traditions*. London: Sage Publications.
- Dambrin, C., Lambert, C., & Sponem, S. (2007). Control and Change Analysing the Process of Institutionalization. *Management Accounting Research*. 18(2), 172-208.
- Ezzamel, M., Robson, K., Stapleton, P., & McLean, C. (2007). Discourse and Institutional Change: Giving Accounts and Accountability. *Management Accounting Research*. 18 (2), 150-171.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. London: Prentice-Hall, Inc.
- Subanar, Subanar. (2011). *Management Usaha Kecil*. Jogjakarta: BPFPE.
- Ludigdo, Unti. (2005). Pemahaman Strukturasi atas Praktik Etika di sebuah Kantor Akuntan Publik. *Ringkasan Disertasi*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Lukka, K. (2007). Management Accounting Change and Stability: Loosely Coupled Rules and Routines in Action. *Management Accounting Research*. 18(1), 76-101.
- Byrd, M. J., & Megginson, L. (2013). *Small Business Management: an Entrepreneur's Guidebook*. (7th ed). Boston: McGrawHill.
- Nor-Aziah, A. K., & Scapens R. W. (2007). Corporatization and Accounting Change: The Role of Accounting and Accountants in a Malaysian Public Utility. *Management Accounting Research*. 18(June), 209-247.
- Pipan, T., & Czarniawska, B. (2010). How to Construct an Actor-Network: Management Accounting from Idea to Practice. *Critical Perspectives on Accounting*. 21(3), 243-251.
- Tsamenyi, M., Cullen, J., & Gonzalez, J. M. G. (2006). Changes in Accounting and Financial Information System in a Spanish Electricity Company: a New Institutional Theory Analysis. *Management Accounting Research*. 17(4), 409-432.
- Siregar. 2015. Pelaku UMKM Mulai Terhantam Perlambatan Ekonomi dan Pelemahan Rupiah. Diakses tanggal 31 Januari 2016 dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/23/161212/pelaku-umkm-mulai-terhantam-perlambatan-ekonomi-pelemahan-rupiah>.